

ABSTRAK

Indonesia merupakan satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan. Pada pelaksanaan sistem otonomi daerah ini pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah Kota/Kabupaten untuk mengelola dan mengatur pemerintahan daerah baik dari segi pembuatan kebijakan maupun sumber pembiayaan program. Sumber pembiayaan yang utama bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kelayakan pendapatan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2013-2017. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif peneliti memfokuskan pada suatu permasalahan yang terjadi dalam realisasi pendapatan retribusi terminal yang tidak mencapai target dan mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, dalam realisasi pendapatan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2013-2017 tidak mencapai target dan mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh faktor rendahnya kesadaran wajib retribusi dalam mematuhi peraturan yang sudah ada dan regulasi/kebijakan pemerintah dalam penetapan target yang terlalu tinggi dinilai tidak sesuai dengan potensi setiap terminal.

Kata kunci: Kelayakan Retribusi, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi.

ABSTRACT

Indonesia is a country that adheres to the system of regional autonomy in the management and implementation of government. In the implementation of the regional autonomy system, the central government gives authority to the city / regency government to manage and regulate regional government both in terms of policy making and program funding sources. The main source of financing comes from Regional Original Revenue (PAD) obtained from local tax revenues and user fees.

This study aims to determine how the feasibility of terminal retribution revenue in the Bandung City Transportation Department in 2013-2017. By using a descriptive research method with a qualitative approach the researcher focuses on a problem that occurs in the realization of terminal retribution that does not reach the target and decreases every year. The data in this study were obtained from observations, interviews and documentation.

The results of this study indicate that the implementation of terminal retribution services at the Bandung City Transportation Department has been carried out properly and in accordance with applicable regulations. However, in the realization of terminal retribution revenue at the Bandung City Transportation Office in 2013-2017 it did not reach the target and experienced a decline, this was due to the low awareness factor of compulsory retribution in complying with existing regulations and government regulations / policies in setting targets that were too high rated not in accordance with the potential of each terminal.

Keywords: Retribution Eligibility, Local Revenue, Retribution

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG